

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Sleman yang susunannya bersifat hierarkis dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat (RI). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Sleman beralamatkan di Jalan Merbabu Nomor 19 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.

##### **a. Visi dan Misi**

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenang, KPU telah menetapkan visi sebagai tujuan yang mencerminkan peran yang akan diwujudkan di masa mendatang. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut, dijabarkan ke dalam misi yang merupakan peran KPU Kabupaten Sleman untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi dan misi KPU Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**b. Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Sleman**

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas, maka KPU Kabupaten Sleman melakukan pembagian divisi dan koordinator wilayah dengan tugasnya masing-masing, yaitu:

- 1) Ahmad Shidqi, S.Th.I.,M.Hum selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman sekaligus sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan SDM.
- 2) Haryanta, S.P., selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- 3) Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc., selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas.
- 4) Imanda Yulianto, S.Sos., selaku Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
- 5) Aswino Wardhana, S.IP., selaku Ketua Divisi Logistik, Keuangan, Rumah Tangga dan Umum.

Susunan koordinator wilayah KPU Kabupaten Sleman meliputi:

- 1) Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc. koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) Sleman 1, meliputi Kecamatan Turi, Sleman dan Tempel.
- 2) Imanda Yulianto, S.Sos. koordinator Dapil Sleman 2, meliputi Kecamatan Ngaglik, Pakem dan Cangkringan.
- 3) Aswino Wardhana, S.IP. koordinator Dapil Sleman 3, meliputi Kecamatan Ngemplak, Kalasan, Prambanan.
- 4) Ahmad Shidqi, S.Th.I, M.Hum. koordinator Dapil Sleman 4, meliputi Kecamatan Depok dan Berbah.
- 5) Imanda Yulianto, S,Sos. koordinator Dapil Sleman 5, meliputi Kecamatan Mlati dan Gamping.

- 6) Haryanta, S.P. koordinator Dapil Sleman 6, meliputi Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir dan Seyegan.

**c. Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman**

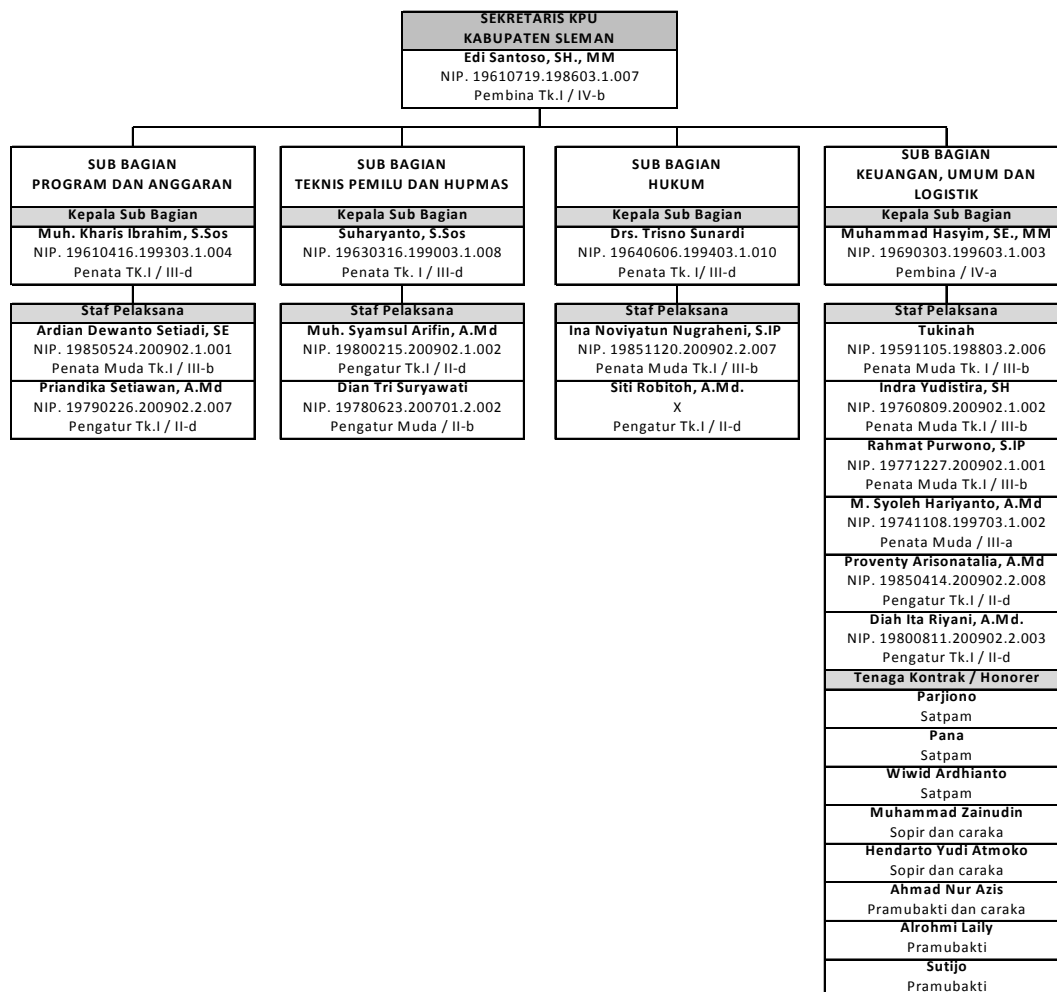
KPU Kabupaten Sleman memiliki badan-badan lain sebagai penunjang kinerja KPU. Badan yang paling utama adalah Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ini bersifat hierarkis dengan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN**  
 KEADAAN : APRIL 2014



Bagan 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman

Badan-badan lain adalah badan yang membantu KPU Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Badan ini bekerja di bawah KPU Kabupaten Sleman. Badan-badan tersebut meliputi:

- 1) Tingkat Kecamatan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 2) Tingkat Kelurahan : Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 3) Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar-benar berkualitas, maka diperlukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan Pemilu. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berkualitas, seharusnya ada badan khusus yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, di tingkat kabupaten terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, di tingkat kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, dan terdapat Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain/kelurahan. Selain itu, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ini KPU Kabupaten Sleman dibantu oleh Relawan Demokrasi yang dibagi dalam segmen penyandang disabilitas, perempuan, pemilih pemula, kaum marginal dan keagamaan dengan jumlah anggota 25 orang.

## **2. Profil Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)**

Persatuan Penyandang Cacat Sleman yang selanjutnya disingkat PPCS merupakan organisasi sosial cabang dari organisasi Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan merupakan “panjang tangan” dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Wilayah kerja PPCS mencakup wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan. PPCS didirikan pada tanggal 3 Agustus 2012 yang

berkantor di Jl. Roro Jonggrang No. 8, Komplek Pemda Sleman, Beran, Tridadi.

Tujuan PPCS adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *public awareness campaign* tentang hak-hak penyandang disabilitas;
- b. Melakukan kampanye potensi penyandang disabilitas se-Kabupaten Sleman;
- c. Melakukan evaluasi bersama antara penyandang disabilitas dan pemegang kebijakan dalam mempengaruhi kesetaraan hak;
- d. Melakukan rekomendasi untuk waktu yang akan datang pada berbagai pihak guna lebih dapat terimplementasikannya peraturan perundangan tentang kedisabilitasan.

Visi PPCS adalah PPCS dapat menjadi pusat pengkajian dan pengembangan kesejahteraan penyandang disabilitas yang mandiri di Kabupaten Sleman, serta menjadi organisasi payung bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang sampai saat ini memiliki anggota berjumlah 8.348 dengan jenis kedisabilitasan rungu dan/atau wicara, netra, penyandang disabilitas fisik (daksa dan lainnya) dan grahita.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PPCS menjabarkan ke dalam beberapa misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pribadi penyandang disabilitas baik dalam organisasi maupun di luar organisasi dan melakukan pengkajian dan pengembangan ekonomi penyandang disabilitas.
- b. Meningkatkan profesionalisme kerabat kerja penyandang disabilitas dalam berorganisasi.

Kegiatan utama PPCS dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan sosialisasi dan advokasi pengurangan resiko bencana (PRB) inklusi disabilitas;
- b. Kegiatan pendampingan demokrasi bagi penyandang disabilitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas dan advokasi penyediaan *reasonable accessibility* dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu;
- c. Kegiatan peningkatan ekonomi melalui kerjasama dengan Dinas Sosial dan organisasi penyandang disabilitas lokal;
- d. Kegiatan olahraga melalui pembinaan atlit dengan disabilitas dan memfasilitasi komunikasi sumber daya dan perencanaan antar atlit atau bakal atlit disabilitas dengan NPC (*National Paralympic Committee*);
- e. Kegiatan advokasi terkait akses terhadap layanan publik.



### 3. Deskripsi Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian untuk pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu menggunakan pedoman pengambilan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan peneliti dalam menentukan subjek penelitian adalah:

- a. Subjek penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman;
- b. Subjek penelitian berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman;
- c. Subjek penelitian merupakan pihak yang secara langsung perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Sleman dan Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS) yang selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Subjek Penelitian (Penyelenggara)

No	Nama	Keterangan
1.	Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sekaligus menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan SDM.
2.	Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, sekaligus menangani pemilih penyandang disabilitas.
3.	Aswino Wardhana, S.IP.	Ketua Divisi Logistik, Keuangan, Rumah Tangga dan Umum.
4.	Imanda Yulianto, S.Sos.	Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
5.	Margiyono	Ketua KPPS TPS 24
6.	AS	Anggota KPPS TPS 39
7.	FE	Anggota KPPS TPS 17

Tabel 5. Deskripsi Subjek Penelitian (Pengurus PPCS)

No	Nama	Keterangan
1.	Kuni Fatonah	Ketua PPCS (penyandang disabilitas daksa).
2.	Ratna Dewi Setianingsih	Sekretaris PPCS yang menyandang disabilitas daksa, sekaligus sebagai anggota Relawan Demokrasi (Relasi) KPU Kabupaten Sleman.

Tabel 6. Deskripsi Subjek Penelitian (Penyandang Disabilitas)

No	Nama	Keterangan
1.	Ratna Dewi Setianingsih	Sekretaris Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS) yang menyandang disabilitas daksa, sekaligus sebagai anggota Relawan Demokrasi (Relasi) KPU Kabupaten Sleman.
2.	Hermanto	Penyandang disabilitas daksa
3.	Ngatijo	Penyandang disabilitas daksa
4.	Sarwanto	Penyandang disabilitas daksa
5.	Sugimin	Penyandang disabilitas daksa
6.	Arifin	Penyandang disabilitas daksa
7.	Puji Rambat	Penyandang disabilitas daksa
8.	Watini	Penyandang disabilitas daksa
9.	Trimo Rejo	Penyandang disabilitas daksa
10.	Jafar Baradi	Penyandang disabilitas daksa, seluruh tubuh sulit digerakkan
11.	Supriyatno	Penyandang disabilitas netra, selaku pengurus Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) DPD Kabupaten Sleman.
12.	Ratna Diah Astuti	Penyandang disabilitas netra
13.	Sis Prayitno	Penyandang disabilitas netra
14.	Suprihono	Penyandang disabilitas netra
15.	Margono	Penyandang disabilitas netra
16.	Saminem	Penyandang disabilitas netra
17.	Sri Purwanti	Penyandang disabilitas netra
18.	Supriyono	Penyandang disabilitas netra
19.	Parman	Penyandang disabilitas netra
20.	Sayuti	Penyandang disabilitas netra
21.	Pak Pujo	Penyandang disabilitas netra, buta huruf
22.	Mudo Diharjo	Penyandang disabilitas rungu
23.	Rini	Penyandang disabilitas rungu-wicara
24.	Dona Dharmawan	Penyandang disabilitas grahita, lemah berpikir
25.	Fajar	Penyandang disabilitas grahita, lemah berpikir
26.	Sarjiyo	Penyandang disabilitas grahita, mental kurang
27.	Pak Ngat	Penyandang disabilitas grahita, emosi tidak terkontrol
28.	Mamang	Penyandang disabilitas ganda
29.	Andhika	Penyandang disabilitas ganda
30.	Samiyem	Penyandang disabilitas daksa

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih 2 (dua) bulan terjun ke lapangan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2014. Pemaparan hasil penelitian akan dirangkum dalam 3 tema besar, yaitu aksesibilitas Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas, harapan dan partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu Legislatif 2014, dan hambatan KPU Kabupaten Sleman dan penyandang disabilitas dalam Pemilu Legislatif 2014. Selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif bagi Penyandang Disabilitas**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten sebagai penyelenggara pemilu yang diawali dari persiapan KPU dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas.

#### **a. Persiapan KPU dalam Memberikan Akses Pemilu bagi Penyandang Disabilitas**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara terutama bagi penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Sleman melakukan beberapa persiapan, yaitu:

- 1) Persiapan pemilih, yaitu pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyandang disabilitas melalui PPK dan PPS. Data ini akan terus diperbaharui sampai menjelang pelaksanaan pemilu.

Pengolahan DPT penyandang disabilitas ini dilakukan secara terpisah untuk mempermudah penyediaan logistik khusus pada saat proses pemungutan suara.

- 2) Persiapan Penyelenggara. KPU Kabupaten Sleman selaku penyelenggara pemilu sebisa mungkin akan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel. KPU melakukan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan pemungutan suara kepada PPK dan PPS yang selanjutnya PPS menyelenggarakan bimtek bagi KPPS.
- 3) Persiapan logistik. Logistik yang dipersiapkan bagi penyandang disabilitas adalah template untuk surat suara DPD yang disediakan oleh KPU Pusat dan surat suara DPR RI yang disediakan oleh KPU Provinsi. Pendistribusian *template* DPR RI disesuaikan dengan data pemilih penyandang disabilitas yang diperoleh dari PPK dan PPS, sedangkan *template* DPD didistribusikan untuk setiap TPS terdapat 1 (satu) *template*. Selanjutnya logistik TPS yang aksesibel diserahkan kepada KPPS dengan terlebih dahulu memberikan bimtek.
- 4) Sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dibantu oleh 3 (tiga) relawan demokrasi yang juga menyandang disabilitas. Hal ini dilandasi dengan alasan bahwa, relawan demokrasi yang juga

menyandang disabilitas ini lebih mengetahui kebutuhan para penyandang disabilitas sehingga akan memperjuangkan hak politiknya. Dalam rangka mempermudah penerimaan materi sosialisasi, pihak KPU menyediakan alat peraga. Bagi penyandang disabilitas runtu, sosialisasi dibantu dengan alat peraga berupa “Ular Tangga Pemilu.” Bagi penyandang disabilitas netra, dilakukan simulasi menggunakan *template* dan bagi penyandang disabilitas wicara meminta bantuan guru untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas runtu dengan menggunakan isyarat.

**b. Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif bagi Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan pemilu telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh KPU Kabupaten Sleman selaku penyelenggara, namun implementasinya masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di lapangan ditemukan beberapa penyandang disabilitas yang belum mampu bertindak secara mandiri dalam menggunakan hak pilihnya.

Setelah dilakukan *cross check* DPT penyandang disabilitas yang diperoleh dari KPU Kabupaten Sleman dengan data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh PPCS, ternyata masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata sebagai pemilih penyandang disabilitas. Hal ini diperkuat dengan temuan peneliti di lapangan, peneliti melakukan pengecekan kecamatan pada DPT penyandang

disabilitas yang tidak terdapat penyandang disabilitas. Ternyata di kecamatan yang bersangkutan terdapat penyandang disabilitas yang jumlahnya tidak sedikit. Peneliti melakukan pengecekan di Kecamatan Godean dan Gamping. Di kecamatan tersebut ditemui beberapa penyandang disabilitas yang telah mempunyai hak pilih, mulai dari penyandang disabilitas netra, daksa, rungu dan/atau wicara dan penyandang disabilitas grahita ringan.

Beberapa TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas, ditemukan beberapa TPS yang belum aksesibel. Di TPS 01, TPS 05, TPS 15, TPS 17, TPS 24 dan TPS 39 tempatnya masih belum aksesibel, yaitu masih terdapat undakan atau tangga yang mempersulit gerak penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu, di TPS 17 masih menempatkan kotak suara dengan ketinggian lebih dari 100 (seratus) cm. Hal ini menyulitkan seorang penyandang disabilitas daksa dalam memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya.

Masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak diperkenankan membawa pendamping yang dipilihnya sendiri, dan harus didampingi oleh petugas KPPS. Selama proses pemungutan suara didampingi oleh petugas, dengan alasan bahwa petugas telah mengucapkan sumpah sehingga tidak akan menyelewengkan tugasnya. Namun demikian, beberapa pendamping di TPS tidak mengisi dan menandatangani formulir C3.

Beberapa penyandang disabilitas netra yang mampu membaca huruf Braille namun dalam pemilu 2014 ini tidak dapat menikmati *template* yang disediakan. Hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas di KPU Kabupaten Sleman. Bahkan, kedisabilitasan penyandang disabilitas justru dimanfaatkan oleh petugas untuk memanipulasi hasil suara dengan hanya memberikan 3 (tiga) surat suara kepada penyandang disabilitas netra.

## **2. Pola Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu Legislatif 2014**

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fisik dan/atau mental karena tidak berfungsinya organ tubuh yang dapat mengakibatkan munculnya hambatan atau kesulitan dalam melakukan mobilitas. Meskipun para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang sempurna.

Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Kedisabilitasan yang disandang penyandang disabilitas, tidak menjadikan hilangnya hak pilih.

Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah bahwa hak pilih merupakan hak setiap warga negara. Penyandang disabilitas berpandangan bahwa



bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak pilih yang sama dengan warga negara lain yang kondisinya sempurna dan mempunyai hak suara yang harus didengar dan tidak ada batas bagi penyandang disabilitas untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilu karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang mampu memahami penyandang disabilitas dengan memenuhi hak-haknya. Terdapat pemilih penyandang disabilitas yang orientasi memilih pada pemilu sebelumnya adalah uang, maka pada pemilu 2014 ini yang menjadi motivasi adalah dia sebagai pemilih yang cerdas, yang berusaha untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.

Terdapat penyandang disabilitas yang dimotivasi oleh agama dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagai umat Islam, akan memilih satu calon pemimpin terbaik diantara calon pemimpin yang baik. Namun demikian, beberapa penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu bukan karena dorongan dari dirinya, yaitu adanya dorongan dari keluarga. Hal ini dikarenakan aktivitas mereka banyak tergantung pada keluarga karena kekurangmampuan melakukan aktivitas secara mandiri.

Para penyandang disabilitas memiliki partisipasi yang tinggi dalam pemilu dengan harapan bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin, diharapkan agar pemimpin yang terpilih

dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Adanya pemilu diharapkan akan terpilih pemimpin yang berkualitas, sehingga kebijakan yang dikeluarkannya pun berspektif penyandang disabilitas. Selain itu, harapan lain adalah agar dapat terpilih pemimpin yang mampu mengerti atau memahami dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, karena selama ini peraturan yang ada masih mendiskriminasi keberadaan penyandang disabilitas, tidak hanya sekedar mengumbar janji palsu.

Partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu Legislatif 2014 dapat dilihat dari keikutsertaan penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPCS menjadi anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2014 untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu, antusias penyandang disabilitas untuk mengikuti proses sosialisasi pemilu baik dari KPU maupun dari Caleg tertentu dengan dipenuhi berbagai pertanyaan seputar pemilu.

Adanya partisipasi juga dapat dilihat dari perjuangan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas netra melalui demonstrasi di depan KPU Kabupaten Sleman yang menuntut agar template pada Pemilu Legislatif 2014 dipenuhi sepenuhnya agar dapat mempermudah gerak mereka ketika pelaksanaan pemungutan suara. Penyandang disabilitas (khususnya netra) ingin mengantisipasi adanya kecurangan oleh petugas jika selama pelaksanaan pemungutan suara disaksikan dan/atau didampingi oleh petugas.

Pada saat pemungutan suara, para penyandang disabilitas tidak menganggap kedisabilitasannya yang disandanginya sebagai penghambat dari gerak mereka. Buktinya, mereka tetap antusias untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan walaupun harus dengan usaha keras maupun dengan pendampingan.

### **3. Hambatan KPU Kabupaten Sleman dan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Legislatif 2014**

#### **a. Hambatan KPU Kabupaten Sleman sebagai Penyelenggara Pemilu**

KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel terutama bagi penyandang disabilitas, tentu tidak lepas dari kendala atau hambatan. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang aksesibel, KPU Kabupaten Sleman tidak lepas dari hambatan dalam memberikan sosialisasi kepada para pemilih penyandang disabilitas.

Pelaksanaan sosialisasi pemilu belum mampu menjangkau semua pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan sosialisasi dilaksanakan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam suatu kelompok tidak mendapatkan sosialisasi. Selain itu, hambatan yang muncul adalah kesulitan menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas, mengingat adanya kebutuhan khusus yang harus diperhatikan.

Dalam upaya mengatasi hambatan yang muncul, pihak KPU dibantu oleh Tim Relawan Demokrasi untuk lebih menggiatkan kegiatan sosialisasi pemilu. Untuk mempermudah transfer materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU mengadakan beberapa alat peraga pemilu dan meminta bantuan kepada pihak yang lebih bisa mampu menyampaikan materi kepada penyandang disabilitas, yaitu para guru Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dalam mengeluarkan kebijakan termasuk dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel khususnya bagi penyandang disabilitas harus berdasarkan aturan yang ada. Namun, dalam melangkah untuk memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu gamang, karena payung hukum yang ada tidak memberikan kewenangan demikian kepada KPU Kabupaten. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ada yang tumpang tindih. Jadi, hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel adalah lebih ke regulasi.

**b. Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih**

Tidak berfungsinya organ tubuh penyandang disabilitas, menjadikan para penyandang disabilitas tidak dapat bertindak secara mandiri sebagaimana manusia sempurna. Hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas pun sering muncul, termasuk kesulitan ketika melaksanakan pemungutan suara. Berbeda kedisabilitasan yang

disandang oleh penyandang disabilitas, berbeda pula tingkat kesulitan yang dihadapinya.

Penyandang disabilitas netra, menemui kesulitan yang cukup berarti ketika pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang bersangkutan mengingat terganggunya penglihatan baik total maupun rabun. Kesulitan paling berarti yang dihadapinya adalah ketika membaca surat suara, terutama penyandang disabilitas netra yang mampu membaca huruf Braille. Pada Pemilu 2014 ini, di Kabupaten Sleman hanya disediakan 2 template untuk surat suara DPD dan DPR RI. Bagi penyandang disabilitas netra, kesulitan yang dihadapinya ketika melakukan pemungutan suara adalah dalam hal membaca surat suara, karena tidak semua surat suara dicetak Braille.

Penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, tidak memiliki kesulitan yang berarti karena telah ada pendamping yang membantunya, baik pendamping dari pihak keluarga maupun dari petugas. Alasannya karena telah ada pihak yang mendampinginya, baik pendamping dari keluarga maupun pendamping oleh petugas TPS.

Lain halnya dengan penyandang disabilitas daksa atau pengguna kursi roda yang memiliki kesulitan dalam mengakses TPS jika terdapat TPS yang tidak aksesibel. Beberapa Penyandang disabilitas daksa yang mendapatkan kesulitan di TPS tempat melakukan pemungutan suara karena tempatnya bertangga atau

berundak tinggi. Oleh karena itu, dalam menuju bilik suara harus diangkat beserta kursi rodanya oleh petugas.

Terdapat penyandang disabilitas daksa yang memiliki hambatan dalam melakukan mobilitas, termasuk kesulitan untuk menuju ke TPS. Penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya di rumahnya sendiri dengan didatangi oleh petugas. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan suara tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja untuk dilakukan pencoblosan dan disaksikan oleh petugas.

Para penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam menggunakan hak pilihnya. Hanya saja dia butuh isyarat atau colekan dari petugas ketika sudah waktunya memasuki bilik suara. Begitu pula penyandang disabilitas grahita ringan yang tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam melakukan pemungutan suara. Beberapa penyandang disabilitas fisik yang melakukan pemungutan suara di sebuah yayasan penyandang disabilitas, tidak menemui kesulitan selama proses pemungutan suara. Hal ini dikarenakan TPS 24 yang dilaksanakan di Yayasan Yakum, tempatnya memang sudah *disetting* sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh para penyandang disabilitas, sehingga mereka dengan mudah menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Namun demikian, sebagian besar penyandang disabilitas selain menemui kesulitan sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilih

disabilitas juga menemui kesulitan ketika proses pencoblosan di bilik suara. Para penyandang disabilitas kebingungan menentukan calon legislatif (caleg) yang akan dipilih, karena tidak pernah menerima sosialisasi. Akibatnya, penyandang disabilitas membutuhkan waktu yang agak lama di bilik suara karena harus mencermati nama-nama caleg satu per satu.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif bagi Penyandang Disabilitas**

Kebutuhan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu harus dipenuhi agar mampu bertindak secara mandiri. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilu dapat ditegakkan. Aksesibilitas Pemilu Legislatif bagi penyandang disabilitas dilihat dari persiapan dan implementasinya yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Persiapan KPU dalam Memberikan Akses Pemilu Legislatif 2014 bagi Penyandang Disabilitas**

Dalam rangka pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, KPU sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan persiapan sebagai berikut:

### **1) Persiapan Pemilih**

Agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasan membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Persiapan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan panitia pelaksana pemilu yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya data yang diperoleh dilaporkan kepada KPU Kabupaten untuk ditetapkan sebagai pemilih. Pendataan pemilih penyandang disabilitas ini berkaitan erat dengan persiapan pengadaan logistik sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Setelah dilakukan pendataan oleh PPK dan PPS, data akan diolah secara terpisah dengan DPT lain untuk mempermudah pendistribusian logistik. Berikut disajikan jumlah DPT penyandang disabilitas di KPU Kabupaten Sleman:



Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas KPU Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Jenis Kedisabilitan				
		Netra	Daksa	Rungu/ Wicara	Grahitita	Ganda
1.	Berbah	11	2	-	-	6
2.	Cangkringan	-	-	-	-	-
3.	Depok	-	-	-	-	-
4.	Gamping	-	-	-	-	-
5.	Godean	-	-	-	-	-
6.	Kalasan	31	29	12	10	2
7.	Minggir	17	1	5	1	-
8.	Mlati	5	10	7	9	-
9.	Moyudan	-	-	-	-	-
10.	Ngaglik	9	6	-	8	3
11.	Ngemplak	14	56	39	57	33
12.	Pakem	3	3	6	7	2
13.	Prambanan	-	-	-	-	-
14.	Seyegan	8	3	-	5	-
15.	Sleman	2	2	-	2	-
16.	Tempel	19	10	2	26	-
17.	Turi	-	-	-	-	-
	Jumlah	119	122	125	72	46
	Total	468				

Sumber: *Database* KPU Kabupaten Sleman

Pendataan pemilih penyandang disabilitas yang dipisah secara tersendiri ini karena berkaitan dengan logistik yang dipersiapkan dan didistribusikan ke setiap TPS sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memutakhirkan data pemilih untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pemilih sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Penyelenggara Pemilu.

## **2) Persiapan Logistik**

Logistik merupakan semua perlengkapan yang diperlukan selama pemungutan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah semua alat kelengkapan di TPS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang meliputi:

- a) Surat suara;
- b) Tinta;
- c) Segel;
- d) Kotak suara;
- e) Bilik pemungutan suara;
- f) Alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g) Tempat pemungutan suara
- h) Sampul kertas;
- i) Formulir;
- j) Stiker nomor kotak suara;
- k) Alat bantu tunanetra;
- l) Perlengkapan di TPS/TPS LN; dan
- m) Daftar Calon Tetap (DCT).

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Sekjen KPU. Logistik atau perlengkapan pemilu yang

disediakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang aksesibel terutama bagi penyandang disabilitas agar dapat dengan mudah dan mandiri dalam menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

a) Surat suara

Surat suara merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara tersebut meliputi:

- (1) Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR;
- (2) Surat suara untuk Pemilu Anggota DPD;
- (3) Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
- (4) Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam upaya memberikan pemenuhan hak pilih khususnya bagi penyandang disabilitas netra, KPU menyediakan perlengkapan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra berupa surat suara dengan huruf Braille atau *template*. Bagi penyandang disabilitas netra yang mampu atau bisa membaca huruf Braille, diharapkan mampu bertindak secara mandiri ketika pelaksanaan pemungutan suara di bilik suara.

Dari keempat surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih, KPU hanya menyediakan 1 (satu) surat suara dengan cetakan huruf *Braille*, yaitu surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini memicu permasalahan yang ditandai dengan demonstrasi oleh para pemilih penyandang disabilitas netra (PERTUNI) di depan KPU Kabupaten Sleman menuntut agar hak pilih penyandang disabilitas netra dipenuhi agar disediakan *template* untuk semua surat suara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, komisioner KPU Kabupaten Sleman menyampaikan kepada KPU Provinsi DIY agar segera ditindaklanjuti. Akhirnya, KPU Provinsi DIY melalui Sekjen KPU Provinsi DIY mengalokasikan dana untuk membuat *template* surat suara DPR RI. Sehingga pada Pemilu Legislatif 2014 ini terdapat 2 (dua) *template*, yaitu surat suara untuk DPD yang disediakan oleh KPU Pusat dan surat suara DPR RI yang disediakan KPU Provinsi DIY.

Pendistribusian *template* untuk surat suara DPD, didistribusikan pada setiap TPS. Jadi setiap TPS terdapat 1 (satu) *template* yang dimasukkan pada kotak suara DPD, sehingga di Kabupaten Sleman terdapat 2.390 *template* untuk surat suara DPD. *Template* untuk surat suara DPR RI didistribusikan ke TPS-TPS berdasarkan data yang diperoleh

dari PPS dan PPK sejumlah pemilih penyandang disabilitas netra, yaitu 119 pemilih.

Namun demikian, penyediaan template sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya, tetap belum mampu memberikan kemudahan secara optimal kepada penyandang disabilitas netra. Penyediaan 2 (dua) dari 4 (empat) suara yang akan dicoblos, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu yang aksesibel masih “setengah hati”. Artinya, KPU sebagai penyelenggara pemilu belum mampu memenuhi hak politik warga negaranya secara maksimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan penyandang disabilitas di negara ini masih didiskriminasi.

Hak asasi manusia berupa hak politik terutama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu telah dibatasi oleh penyediaan logistik berupa surat suara Braille bagi penyandang disabilitas. Pada dasarnya, pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Namun, penyediaan template yang masih “setengah hati” menunjukkan bahwa pelaksanaan hak politik belum setara, yaitu dalam situasi yang berbeda seharusnya setiap warga negara juga diperlakukan berbeda. Diskriminasi ditunjukkan dengan perbedaan perlakuan antara pemilih penyandang disabilitas dengan pemilih yang “normal” dengan belum

diperhatikannya kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Jika KPU Kabupaten Sleman tidak dapat mengadakan logistik alat bantu penyandang disabilitas netra berupa *template* dengan alasan akan bertentangan dengan peraturan yang ada, maka telah jelas bahwa peraturan yang ada masih diskriminatif. Misi KPU untuk melayani dan memperlakukan setiap pemilih secara setara dan adil belum dapat dilaksanakan.

b) TPS Aksesibel

TPS aksesibel adalah salah satu perlengkapan dalam pemilu ketika pelaksanaan pemungutan suara yang dapat diakses oleh setiap pemilih secara mudah, terutama bagi penyandang disabilitas. Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu memuat ketentuan bahwa TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Kriteria TPS aksesibel adalah diutamakan pada lokasi sebagai berikut (Suryatiningsih, 2014: 9):

- (1) Tidak berumput tebal;
- (2) Tidak ada got pemisah;
- (3) Tidak becek;

- (4) Sedapat mungkin dibangun tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga;
- (5) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (*template*);
- (6) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya;
- (7) Bagi penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara, jika sudah waktunya masuk TPS jika dipanggil supaya dicolek atau didekati.

### **3) Persiapan Penyelenggara**

KPPS sebagai pihak yang dibentuk oleh PPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapatkan bimbingan dan arahan terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara. Agar pemilu terlaksana sebagaimana yang diharapkan, KPPS dibekali pemahaman pelaksanaan pemilu melalui bimbingan teknis (bimtek) dan diberi pegangan berupa buku panduan KPPS sebagai pedoman ketika pelaksanaan pemilu.

Tujuan dibentuk KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan

hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya (Buku Panduan KPPS, 2014: 1).

Petugas KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendampingan penyandang disabilitas di dalam TPS, yaitu (Suryatiningsih, 2014: 9-10):

- a) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara suara ke dalam *template* yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu *template* dengan menjaga kerahasiaan pemilih.
- b) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping



dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.

- c) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan.

Pihak yang dapat menjadi pendamping pemilih yang membutuhkan pendampingan pada saat pelaksanaan pemungutan suara adalah petugas KPPS atau orang lain yang ditunjuk sendiri oleh penyandang disabilitas. Jika pendampingan dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas, maka pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3.

#### **4) Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan misi KPU dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama melalui pelaksanaan sosialisasi pemilu. Melalui sosialisasi pemilu, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada (2011: 1) bahwa tujuan sosialisasi pemilu adalah untuk:

- a) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;

- b) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu;
- c) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu;
- e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan nilai-nilai politik. Menurut Nasiwan, dkk (2012: 152), sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasionalnya. Sosialisasi politik ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilu. Melalui sosialisasi politik, akan dapat membentuk pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang memilih dengan didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, visi-misi dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau kontestan pemilu (Firmanzah, 2008: 121).

Pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Sleman dibantu oleh 25 orang Relawan Demokrasi (Relasi) yang dibagi ke dalam

segmen pemilih penyandang disabilitas, perempuan, pemilih pemula, kaum marginal dan kelompok keagamaan. Sosialisasi untuk pemilih penyandang disabilitas dibantu oleh 3 (tiga) orang Relawan Demokrasi yang juga sebagai penyandang disabilitas, dengan harapan agar hak-hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terus diperjuangkan karena dinilai mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan penyandang disabilitas. Tim Relawan Demokrasi pada segmen penyandang disabilitas yang juga menyandang disabilitas adalah Ratna Dewi Setianingsih, Dodi Kurniawan Kaliri dan Puji Santoso.

Tiga Relawan Demokrasi yang menangani penyandang disabilitas kebetulan berasal dari Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS), sehingga tim relawan ini bekerja sekaligus untuk mendukung kegiatan utama PPCS dalam bidang pendampingan demokrasi guna meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas diserahkan kepada Tim Relasi, meskipun tidak sepenuhnya karena tugas utama Tim Relasi ini adalah melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan pada komunitas atau kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang waktunya mengikuti pertemuan kelompok penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi;
- b) Tata cara pemberian suara dalam pemilu;
- c) Pengenalan terhadap kontestan pemilu; dan
- d) Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen, diantaranya adalah kedisabilitasan dan gender.

Dalam rangka mempermudah pemahaman para pemilih penyandang disabilitas dalam menerima materi yang disampaikan selama sosialisasi, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengadakan alat peraga dan berusaha menjalin kerjasama terhadap pihak yang lebih mampu berkomunikasi secara efektif kepada penyandang disabilitas, yaitu:

- a) Mengadakan alat peraga berupa “Ular Tangga Pemilu” yang digunakan sebagai alat bantu sosialisasi bagi penyandang disabilitas rungu. Ular tangga pemilu ini berisi tentang sikap dan tindakan dalam pemilu untuk menciptakan pemilih yang cerdas. Seperti diketahui bahwa penyandang disabilitas rungu memiliki keterbatasan kemampuan mendengar, sehingga dengan diadakannya alat peraga sosialisasi berupa ular tangga pemilu ini diharapkan akan lebih mempermudah untuk mentransfer materi kepada penyandang disabilitas rungu.

- b) Bagi penyandang disabilitas netra, pelaksanaan sosialisasi dengan cara mensimulasikan surat suara menggunakan *template* Pemilu Legislatif 2009 karena *template* simulasi pemilu tahun 2014 tidak ada. Petugas sosialisasi harus dengan sangat tekun untuk menjelaskan dan membimbing pemilih penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya. Karena hanya dengan mengandalkan suara saja, materi sulit untuk diterima secara mudah.
- c) Bagi pemilih pemula penyandang disabilitas wicara dan/atau rungu yang berada di lembaga pendidikan, karena petugas sosialisasi merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas wicara, maka KPU menjalin kerjasama dengan guru-guru di Sekolah Luar Biasa (SLB). Guru memberikan bantuan untuk melaksanakan sosialisasi pemilu kepada siswa yang telah memiliki hak pilih yang menyandang disabilitas wicara dan/atau rungu.

Sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas telah telaksana beberapa kali pertemuan, yaitu:

Tabel 8. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu bagi Penyandang Disabilitas

No.	Tanggal	Tempat	Jumlah
1.	Minggu I Nov 2013	Sambirejo, Selomartani, Kalasan	50 orang
2.		Pondok I, Widodomartani, Ngemplak	
3.	22 Des 2014	Lapangan Beran, Tridadi, Sleman	
4.	5 Jan 2014	Kantungan A, Merdikorejo, Tempel	25 orang
5.	5 Jan 2014	Dadapan, Wonokerto, Turi	10 orang
6.	5 Jan 2014	Widodomartani, Ngemplak	22 orang
7.	8 Feb 2014	Jambon, Trihanggo, Gamping	16 orang
8.	18 Feb 2014	Jambon, Trihanggo, Gamping	
9.	26 Feb 2014	Tempel	12 orang
10.	2 Maret 2014	DPD Pertuni Sleman	31 orang
11.	7 Maret 2014	Pelem Candibinangun, Pakem	17 orang
12.	16 Maret 2014	Pisangan, Sumberrejo, Tempel	25 orang
13.	18 Maret 2014	Kantor Ciqal, Jambon, Trihanggo	30 orang
14.	23 Maret 2014	BBLK Sleman	
15.	23 Maret 2014	Kube Difabel Sleman	40 orang
16.	25 Maret 2014	SLB C Panti Asih	20 orang
17.	25 Maret 2014	SLB Negeri Sleman	35 orang
18.	27 Maret 2014	SLB Tunas 2 Tangguhrejo, Turi	30 orang
19.	29 Maret 2014	SLB B WD I Sleman	30 orang
20.	30 Maret 2014	Paguyuban Tuna Daksa Sleman	40 orang
21.	4 April 2014	SLB Prambanan	
22.	8 April 2014	SLB G Daya Ananda Kalasan	

Sumber: *Database* KPU Kabupaten Sleman

#### **b. Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi Penyandang Disabilitas**

Dalam pelaksanaan pemilu, tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu berupaya mempersiapkan segala kebutuhan pemilu semaksimal mungkin agar kebutuhan setiap pemilih dapat terpenuhi, sehingga hak suaranya dapat tersalurkan. Namun demikian, apa yang telah dipersiapkan sebelum

pelaksanaan pemilu, dalam pelaksanaan pemilu di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meskipun pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh KPU Kabupaten Sleman, baik mulai dari persiapan pemilih, persiapan logistik sampai dengan persiapan penyelenggara, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih belum optimalnya pemberian akses pemilu terutama kepada penyandang disabilitas berakibat pada belum mampunya pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Belum optimalnya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1) Pendataan pemilih**

Pendataan pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPK mengenai pemilih penyandang disabilitas, ternyata belum mampu menjangkau data pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Dari 468 pemilih penyandang disabilitas yang terdata di KPU Kabupaten Sleman, masih banyak penyandang disabilitas yang belum tercatat ke dalam daftar pemilih penyandang disabilitas. Hal ini tentu akan berdampak pada tidak terdistribusikan dan tidak



terpenuhinya logistik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam rangka mempermudah penggunaan hak pilihnya. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya secara mandiri dan tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Beberapa penyandang disabilitas yang ditemui oleh peneliti tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena berasal dari luar Kabupaten Sleman dan tidak mampu mengurus formulir A5 secara mandiri karena keterbatasan fisik akibat tidak berfungsinya organ tubuhnya secara maksimal. Sehingga nama mereka tidak tercatat di Kabupaten Sleman sebagai pemilih di Kabupaten Sleman. Sisi lain dari penyandang disabilitas adalah memiliki motivasi yang tinggi untuk menyalurkan hak suaranya. Hal ini ditunjukkan dengan kekecewaan para penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, namun tetap datang ke TPS untuk menyaksikan pemilih lain dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data yang peneliti terima dari Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS), yaitu organisasi sosial kepanjangan tangan Dinas Sosial Sleman yang menangani khusus penyandang disabilitas terkait penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih, bahwa tercatat sebanyak 781 orang sebagai penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan pemilih penyandang disabilitas

yang dilakukan oleh PPK dan PPS belum mampu menjangkau semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman.

Tidak jelinya petugas dalam melakukan pendataan, merupakan salah satu indikasi pelanggaran hak asasi manusia, karena akan berdampak pada perlakuan yang tidak sama dalam keadaan yang tidak sama untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, fakta tersebut juga menunjukkan bahwa petugas tidak melakukan tugasnya secara maksimal untuk memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas. Sebaliknya, hak politik penyandang disabilitas justru diabaikan dan tidak diperhatikan.

## **2) Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan pada komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman dengan jadwal mengikuti pertemuan komunitas atau organisasi

yang bersangkutan. Karena pelaksanaan sosialisasi hanya di komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi pemilu hanya diterima oleh penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam suatu organisasi tidak mendapatkan sosialisasi pemilu.

Beberapa penyandang disabilitas terutama yang terlibat dalam penelitian ini, beberapa mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Akibatnya, penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak pada kebingungan memilih calon ketika proses pencoblosan di bilik suara.

Proses sosialisasi dengan metode ceramah tentu memunculkan permasalahan baru bagi penyandang disabilitas netra. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin.

### 3) Pengadaan Logistik

Logistik atau perlengkapan yang telah dipersiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, ternyata belum aksesibel dan belum berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti selama pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April 2014, menunjukkan bahwa belum berpihaknya logistik yang disediakan bagi penyandang disabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a) Surat suara

Alat bantu surat suara dengan cetakan huruf Braille berupa *template* bagi penyandang disabilitas netra yang telah disediakan oleh KPU, pada implementasinya belum mampu membantu sepenuhnya bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya selama di bilik suara. Hal ini mengingat bahwa dari 4 (empat) surat suara yang akan dicoblos, pihak KPU hanya menyediakan 2 (dua) surat suara, yaitu surat suara DPD dan DPR RI. Sehingga penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam hal ini *template* masih hanya “setengah hati”, karena dalam menggunakan hak pilihnya para penyandang disabilitas netra ini tetap membutuhkan pendamping atau bantuan, belum mampu bertindak secara mandiri.

Permasalahan lain adalah bahwa beberapa pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille yang berhasil ditemui oleh peneliti, yaitu sebanyak 5 pemilih ternyata tidak menikmati kemudahan dan kemandirian dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan belum meratanya pendataan pemilih penyandang disabilitas, sehingga beberapa penyandang disabilitas netra tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas di KPU Kabupaten Sleman. Akibatnya, TPS tempat penyandang disabilitas yang bersangkutan melakukan pencoblosan tidak terdistribusikan logistik berupa surat suara alat bantu bagi penyandang disabilitas netra untuk surat suara DPR RI, karena pendistribusian surat suara DPR RI bagi penyandang disabilitas netra berdasarkan data yang tercatat dalam DPT penyandang disabilitas di KPU Kabupaten Sleman.

Walaupun *template* surat suara DPD didistribusikan merata di setiap TPS, namun beberapa penyandang disabilitas netra tidak menerimanya. Setelah dilakukan *cross check* dengan petugas, ternyata petugas mengaku tidak mengetahui fungsi dari *template* yang telah didistribusikan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan bimtek oleh KPU Kabupaten Sleman belum berhasil. Buktinya, bahwa petugas KPPS tidak mengetahui fungsi dari *template* yang ada di setiap TPS yang

akibatnya pemilih penyandang disabilitas netra tidak menerima *template* ketika melakukan pemungutan suara.

b) Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di tempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan, dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Adanya TPS yang aksesibel, memberikan peranan besar dalam memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas terutama para penyandang disabilitas daksa atau pengguna kursi roda karena fisiknya yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas tanpa bantuan kursi roda.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, berdasarkan pantauan/observasi peneliti pada 9 April 2014 di beberapa TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas daksa ternyata masih terdapat TPS yang belum aksesibel, yaitu:

- (1) Sebanyak 6 (enam) TPS dari 10 (sepuluh) TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas daksa yang dipantau oleh peneliti masih berundak atau bertangga, sehingga pemilih penyandang disabilitas harus dibantu oleh petugas atau keluarga untuk menuju ke TPS. Bantuan yang diberikan berupa bantuan untuk membantu penyandang disabilitas daksa menaiki undakan atau tangga dengan mengangkat kursi roda yang digunakannya. Bantuan juga berupa gendongan, yaitu menggendong penyandang disabilitas sampai ke bilik suara karena tangga di TPS terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan petugas untuk mengangkat kursi roda yang digunakan oleh penyandang disabilitas sampai di TPS.

Berdasarkan pantauan peneliti, peneliti hanya menemukan 1 (satu) TPS yang diselenggarakan di tempat yang rata dan tidak berundak atau bertangga dan benar-benar aksesibel, yaitu TPS yang diselenggarakan di sebuah yayasan penyandang disabilitas yang lokasinya memang sudah didesain sedemikian rupa untuk mempermudah gerak penyandang disabilitas.

- (2) Masih terdapat TPS yang belum menempatkan kotak suara di bawah ketinggian 100cm, akibatnya penyandang disabilitas daksa tidak mampu memasukkan surat suara

yang telah dicoblosnya secara mandiri karena terlalu tinggi dan harus dibantu oleh petugas atau pendamping yang telah dipilihnya sendiri.

Penyediaan TPS yang belum aksesibel tentu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013. Dalam Pasal 17 ayat (2) memuat ketentuan bahwa TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Adanya TPS yang masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda dikarenakan pada pintu masuk dan keluar terdapat tangga atau berundak, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ini belum aksesibel. Hal ini akan berdampak pada tidak terjaminnya penggunaan hak pilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan mandiri.

#### **4) Penyelenggara**

Keberadaan petugas TPS, yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) juga memiliki peranan yang besar dalam memberikan bantuan, baik berupa colekan pada saat telah



tiba waktunya masuk ke bilik suara bagi pemilih penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara maupun bantuan berupa pendampingan ketika pelaksanaan pencoblosan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan. Petugas KPPS sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pemilih, karena memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS belum memberikan perhatian sepenuhnya terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas.

Masih ada beberapa anggota KPPS yang belum mengetahui jika disediakan logistik pemilu alat bantu bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra berupa alat bantu template. Hal ini tentu berakibat tidak terpenuhinya prinsip pelaksanaan pemilu yang mandiri oleh penyandang disabilitas karena tidak menerima alat bantu template.

Dari 10 (sepuluh) TPS yang dilakukan observasi, masih terdapat petugas yang melarang penyandang disabilitas netra untuk membawa atau menentukan pendamping sendiri. Hal ini dengan alasan bahwa para petugas sebelum melaksanakan tugasnya sudah mengucapkan sumpah, sehingga tidak mungkin jika petugas akan menyelewengkan pilihan pemilih. Hal ini tentu telah bertentangan ketentuan Pasal 29 dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia, dan secara hukum Indonesia harus mematuhi dan menerapkan

dalam kehidupan bernegara. Di dalam pasal tersebut berisi ketentuan bahwa pemilih penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan memiliki jaminan kebebasan untuk menentukan pendamping sendiri.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa petugas belum memperhatikan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas adalah adanya penyandang disabilitas netra (2 pemilih) yang hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara dari 4 (empat) surat suara yang akan dicoblos. Ketika penyandang disabilitas menerima 3 (tiga) surat suara dan berusaha menanyakan kepada petugas, petugas memberikan pernyataan bahwa pada pemilu ini hanya ada 3 surat suara yang dicoblos. Peneliti mencoba melakukan klarifikasi kepada petugas TPS, dan jawaban petugas adalah bahwa setiap pemilih selalu diberi satu paket surat suara yang mencakup surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kasus ini memiliki indikasi bahwa 1 (satu) suara penyandang disabilitas telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menambah suara calon yang didukungnya.

Penyandang disabilitas yang melakukan pencoblosan di rumahnya dengan disaksikan oleh petugas telah mengaburkan jaminan kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Adanya petugas yang tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, tentu telah menghilangkan tujuan dibentuknya KPPS. Salah satu tujuan dibentuk KPPS adalah untuk memberikan akses dan layanan kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Beberapa uraian tentang aksesibilitas Pemilu Legislatif 2014 bagi penyandang disabilitas tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu 2014 belum aksesibel, artinya pemilu belum bisa diakses secara mudah dan utuh oleh semua pemilih, terutama bagi penyandang disabilitas secara mandiri. Dapat dikatakan belum aksesibel karena berdasarkan beberapa alasan, diantaranya 6 dari 10 TPS masih berundak/bertangga, 10 penyandang disabilitas netra yang dilibatkan dalam penelitian tidak ada yang menikmati template dan penyandang disabilitas tidak dapat memilih sendiri pendampingnya untuk mencoblos. Bahkan, fakta-fakta di atas juga menunjukkan bahwa keberadaan penyandang disabilitas dalam masyarakat belum diperhatikan dan terkadang kondisi yang disandang oleh penyandang disabilitas dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan tertentu dengan cara yang tidak bertanggungjawab.

Tujuan pelaksanaan pemilu sebagai wujud pelaksanaan prinsip hak asasi warga negaranya ternyata belum dapat diwujudkan secara optimal, karena hak politik warga negara yaitu

hak aktif untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dalam pemilu masih belum diperhatikan. Akibatnya, hak warga negara untuk memilih belum dapat dilaksanakan secara mandiri dan dengan prinsip kebebasan.

Munculnya kebijakan desentralisasi ke daerah-daerah, ternyata melahirkan partisipasi publik yang lebih baik (Kacung Marijan, 2010: 124), tidak terkecuali partisipasi politik yang tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditekankan pentingnya lembaga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. KPU Kabupaten sebagai lembaga di tingkat lokal dianggap sebagai lembaga penopang berhasil tidaknya pelaksanaan pemilu di tingkat daerah (kabupaten). Berdasarkan desentralisasi politik, perhatian ditekankan pada bagaimana lembaga di tingkat lokal mampu membangun sebuah proses politik yang lebih baik, sehingga kehidupan politik di tingkat lokal bisa berlangsung lebih demokratis.

Tahun 2014, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu yang ke-11 terhitung semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955. Pemilu merupakan salah satu wadah untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara dalam melakukan partisipasi politik. Tinggi rendahnya partisipasi politik dalam pemilu, merupakan tanggungjawab besar bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang ada di daerah, seharusnya mampu meng-*cover* partisipasi politik warga negara yang ada di daerah sebagai usaha mewujudkan demokrasi Indonesia.

Berdasarkan teori kelembagaan baru sebagaimana diusung oleh Kacung Marijan (2010: 155), bahwa KPU Kabupaten Sleman sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat lokal seharusnya mampu melakukan perubahan kelembagaan yang lebih substansial, baik dalam struktur organisasi maupun fungsinya. KPU saat ini telah melakukan perubahan struktur organisasi maupun fungsinya semenjak pemilu 2004 dimana pada pemilu sebelumnya KPU diisi oleh anggota partai politik dan wakil pemerintah yang dinilai akan mempertahankan rezim yang sedang berkuasa pada saat itu. KPU dituntut bekerja secara independen dan bertanggungjawab serta tidak partisan.

Apabila pada pemilu sebelumnya banyak pihak yang menilai bahwa KPU belum optimal dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas, sebagai lembaga yang bersifat statis pada pemilu 2014 ini seharusnya mampu mengoptimalkan tugas dan kewenangannya. Setelah dilaksanakannya Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti akhirnya dapat dicermati bagaimana kinerja KPU dalam mewujudkan cita-cita Pemilu 2014 sebagai pemilu yang aksesibel.

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas telah diketahui bahwa hak politik penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dengan prosedur, fasilitas dan bahan-bahan pemilihan yang bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan belum dapat dipenuhi secara optimal. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sleman sebagai lembaga di tingkat lokal yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilu di tingkat daerah kabupaten belum memperhatikan dan cenderung mengabaikan hak politik penyandang disabilitas yang ditunjukkan dengan penyediaan fasilitas dan prosedur yang belum aksesibel.

Sebagai lembaga baru di tingkat lokal yang bekerja dengan prinsip mandiri dan independen, KPU Kabupaten Sleman seharusnya mampu belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya dengan melakukan perubahan struktur organisasi maupun fungsi ke arah yang lebih baik. Pemilu yang akuntabel, dapat meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang demokratis.

Meskipun KPU telah melakukan perubahan struktur organisasi dan fungsinya ke arah yang lebih baik, yaitu sebagai lembaga yang independen, namun KPU Kabupaten Sleman belum mampu melaksanakan fungsinya ke arah yang lebih baik. Implementasinya, justru pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas dalam pemilu adalah lebih buruk dari pemilu sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa instrumen peraturan yang dikeluarkan oleh KPU yang belum memberikan perhatian dan ruang gerak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penyediaan fasilitas, prosedur maupun pelayanannya masih jauh dari prinsip aksesibel, karena para penyandang disabilitas masih menemui kesulitan untuk bertindak secara mandiri dalam menggunakan hak pilihnya.

## **2. Pola Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Legislatif 2014**

Keberadaan penyandang disabilitas dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri. Menjadi penyandang disabilitas bukanlah pilihan hidup, namun hal tersebut merupakan takdir Tuhan kepada manusia yang harus disyukuri. Tidak berfungsinya organ tubuh yang menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan melakukan mobilisasi, menuntut semua pihak termasuk pemerintah untuk memberikan fasilitas khusus sesuai apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas agar mampu bertindak atau melakukan aktivitas secara mandiri.

Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Syarat menjadi pemilih tidak dilihat dari kemampuan diri pemilih. Syarat menjadi pemilih dalam pemilu

berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari pemungutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
- b. Sudah atau pernah kawin.

Berdasarkan syarat menjadi pemilih di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 6 bahwa yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang:

- a. Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A3-KPU);
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A4-KPU);
- c. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A Khusus KPU);
- d. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus KPU).

Syarat menjadi pemilih sebagaimana disebutkan di atas, dimaksudkan untuk tidak membatasi pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK atau DPKTb berhak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Hak pilih warga negara dijamin oleh UUD 1945 maupun peraturan perundangan di bawahnya. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak pilih bagi penyandang disabilitas. Negara melalui pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan. Pada bagian ini



akan diungkap potret penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

Partisipasi politik penyandang disabilitas yang tinggi, tentu dilatarbelakangi oleh keinginan dan harapan. Motivasi adalah hal yang mendorong penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan harapan adalah apa yang diharapkan oleh penyandang disabilitas melalui pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan data yang diperoleh, motivasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah:

- 1) Agar dapat menentukan pemimpin yang adil dan peduli kepada penyandang disabilitas;
- 2) Keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin, karena penyandang disabilitas juga memiliki hak suara yang harus didengar;
- 3) Keinginan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi;
- 4) Adanya dukungan keluarga dan rekan untuk menggunakan hak pilih.

Perbedaan jenis kedisabilitasan yang disandang oleh penyandang disabilitas, tidak memunculkan perbedaan harapan dari pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, harapan penyandang disabilitas melalui pelaksanaan pemilu adalah agar terpilih pemimpin yang berkualitas, yaitu pemimpin yang peduli dan memberikan

ruang gerak kepada penyandang disabilitas untuk berkarya serta mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini didiskriminasi, baik secara formulasi maupun fasilitas yang disediakan. Para penyandang disabilitas juga menaruh harapan agar disediakan fasilitas maupun prosedur pemungutan suara yang aksesibel.

Partisipasi politik penyandang disabilitas yang dilakukan dengan jalan ikut berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin melalui pemilihan umum dengan harapan akan dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memihak penyandang disabilitas. Dalam hal ini Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajibannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Miriam Budiardjo (2008: 367), bahwa kegiatan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka harapan atau tujuan para penyandang disabilitas memiliki antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah agar kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan berperspektif atau memperhatikan kondisi penyandang disabilitas.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Cholisin, dkk, 2007: 151) juga menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bermaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Hal ini mengingat bahwa beberapa keputusan atau kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah selama ini masih banyak yang belum memperhatikan kondisi penyandang disabilitas, atau masih diskriminatif.

Berdasarkan paparan di atas, pemilih penyandang disabilitas dapat dipandang dari pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologis untuk memandang pemilih penyandang disabilitas yang dimotivasi oleh latar belakang sosial terutama peranan keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan pemilih rasional untuk penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan motivasi untuk dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Keterbatasan kemampuan melakukan aktivitas dalam diri penyandang disabilitas tidak menyebabkan penyandang disabilitas memilih untuk *abstain* dari aktivitas politik, salah satunya adalah partisipasi politik dalam pemilihan umum. Dalam Pemilu Legislatif 2014, partisipasi politik penyandang disabilitas dapat dilihat mulai dari keikutsertaan penyandang disabilitas menjadi anggota Relawan Demokrasi di KPU Kabupaten Sleman. Terlibatnya penyandang disabilitas dalam KPU sebagai penyelenggara pemilu, diharapkan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu dapat dipenuhi. Kegiatan ini termasuk dalam rambu-rambu partisipasi politik untuk mendukung sekaligus mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu agar terwujud pemilu yang aksesibel.

Partisipasi politik penyandang disabilitas juga dilakukan dengan cara demonstrasi untuk memperjuangkan dipenuhinya hak-hak

penyandang disabilitas terkait dengan penyediaan logistik pemilu khususnya surat suara dalam cetakan Braille. Kegiatan tersebut termasuk dalam rambu-rambu partisipasi politik secara langsung dengan cara tatap muka kepada KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu.

Antusias penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu termasuk dalam kegiatan partisipasi politik berupa kegiatan mendukung pemerintah. Selama pelaksanaan sosialisasi, antusias penyandang disabilitas terlihat dengan munculnya banyak pertanyaan tentang visi, misi, maupun program dari para caleg dan informasi seputar proses pemungutan suara.

Partisipasi politik langsung penyandang disabilitas untuk mempengaruhi pemerintah juga dilakukan melalui prosedur yang wajar, yaitu dengan cara ikut memilih dalam pemilihan umum. Dalam Pemilu Legislatif 2014, pemilih penyandang disabilitas memiliki antusias untuk menggunakan hak pilihnya dengan maksud untuk menyuarakan pilihannya.

Hal ini dibuktikan dengan data bahwa, dari 30 penyandang disabilitas dengan jenis kedisabilitan netra, rungu dan/atau wicara, daksa, grahita ringan, ganda, dan kedisabilitan fisik lainnya yang dapat menyebabkan penyandang disabilitas terhambat dalam menggunakan hak pilih yang dilibatkan dalam penelitian ini hanya ada 2 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya. Satu diantaranya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput karena tidak

terdaftar sebagai pemilih di KPU Kabupaten Sleman, sedangkan satu pemilih lainnya memilih golput karena terpaksa. Terpaksa memilih golput karena kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tidak memiliki alat bantu berupa kursi roda untuk mempermudah gerakannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Legislatif sangat tinggi.

Perilaku politik yang dilakukan para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tersebut termasuk tindakan partisipasi politik, yaitu untuk mempengaruhi pihak pemerintah dalam menjalankan fungsinya, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut kehidupan warga negara. Menurut Miriam Budiardjo (2008: 367), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, partisipasi politik dilakukan dengan jalan memilih calon pemimpin secara langsung dengan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kacung Marijan (2010: 1818), bahwa dalam upaya memengaruhi pemerintah secara langsung tanpa menggunakan perantara individu lainnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam kegiatan pemilu. Partisipasi politik oleh penyandang disabilitas dalam pemilu, sebagaimana diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (1992: 140), bahwa kegiatan partisipasi politik dalam rangka untuk ikut

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidup warga negara. Kegiatan partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Hal ini sangat berkaitan dengan motivasi dan harapan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

Bukti lain ditunjukkan dengan kekecewaan penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas berasal dari luar Kabupaten Sleman dan belum mendaftarkan diri ke dalam Formulir Model A5-KPU untuk berpindah tempat pemilihan dengan alasan ketidakmampuan untuk mengurus Formulir Model A5-KPU secara mandiri mengingat kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Formulir Model A5-KPU merupakan formulir yang digunakan oleh pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat pemilih terdaftar sebagai DPT dan memilih untuk memberikan suara di TPS lain. Walaupun tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu ini, keinginan partisipasi yang besar ditunjukkan dengan tetap datang ke TPS untuk menyaksikan warga lain yang melakukan pemungutan suara.

### **3. Hambatan KPU Kabupaten Sleman dan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Legislatif 2014**

#### **a. Hambatan KPU Kabupaten Sleman dalam Memberikan Akses Pemilu Legislatif bagi Penyandang Disabilitas**

KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilu di tingkat daerah kabupaten tentu tidak lepas dari hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aksesibel. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sleman dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas adalah pelaksanaan sosialisasi pemilu belum mampu menjangkau semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman, karena pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan kemampuan pelaksana sosialisasi dalam menyampaikan materi, karena penyandang disabilitas (netra dan wicara dan/atau rungu) membutuhkan perlakuan khusus juga menjadi hambatan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan sosialisasi pemilu.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut agar pelaksanaan pemilu yang aksesibel tetap dapat diwujudkan, maka pihak KPU menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang lebih mengerti dan memahami penyandang disabilitas, diantaranya

adalah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Tim Relawan Demokrasi.

Hambatan lain yang dihadapi oleh KPU dalam memberikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas adalah adanya peraturan tentang penyelenggaraan pemilu yang tumpang tindih. Penyediaan logistik khususnya alat bantu bagi penyandang disabilitas netra berupa template yang dilakukan oleh pusat, menimbulkan hambatan tersendiri bagi KPU Kabupaten Sleman. Di sisi lain KPU sebagai penyelenggara pemilu berusaha memberikan akses bagi penyandang disabilitas, namun di sisi lain regulasi tidak memberikan kewenangan tersebut kepada KPU di tingkat daerah. Akibatnya, KPU Kabupaten Sleman tidak dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas khususnya penyediaan template. Namun, dalam melangkah untuk memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu gamang, karena payung hukum yang ada tidak memberikan kewenangan demikian kepada KPU Kabupaten. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ada yang tumpang tindih. Jadi, hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel adalah lebih ke regulasi yang membatasi kewenangan KPU Kabupaten.



**b. Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih**

Dalam pelaksanaan untuk menggunakan hak pilih, tentu penyandang disabilitas menemui kesulitan atau hambatan tersendiri karena tidak berfungsinya organ tubuh secara optimal. Namun demikian, penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara tidak memiliki hambatan yang serius, mereka cukup didekati atau dicolek ketika sudah waktunya masuk TPS. Beberapa hambatan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih terutama bagi penyandang disabilitas netra, daksa dan ganda adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi pemilu belum diterima oleh semua penyandang disabilitas, karena sosialisasi oleh pihak KPU Sleman hanya dilakukan pada kelompok atau komunitas penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam suatu kelompok maka tidak mendapatkan sosialisasi. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak mengetahui nama-nama calon legislatif yang juga berdampak pada kebingungan memilih calon ketika proses pencoblosan di bilik;
- 2) Beberapa TPS belum mampu diakses secara mandiri oleh pemilih penyandang tuna daksa, misalnya adanya TPS yang bertangga atau berundak yang menyulitkan gerak penyandang disabilitas daksa, kotak suara terlalu tinggi sehingga

penyandang disabilitas daksa tidak mampu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara secara mandiri;

- 3) Bagi penyandang tuna netra yang mampu membaca huruf *Braille*, belum mampu bertindak mandiri sepenuhnya, karena dari 4 (empat) surat suara yang akan dicoblos hanya disediakan 2 template sehingga tetap membutuhkan pendamping;
- 4) Bagi tuna ganda yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk menuju ke TPS lebih memilih golput karena petugas tidak mau “menjemput bola” untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas yang benar-benar kondisinya tidak memungkinkan menuju ke TPS.

Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Ishak Salim (2014: 6) bahwa hambatan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indonesia tidak memiliki data pemilih penyandang disabilitas;
- 2) Kurang tersedianya alat bantu mencoblos;
- 3) Lokasi TPS menyulitkan pemilih;
- 4) Masih keluarga beranggapan bahwa menjadi penyandang disabilitas adalah aib dan ‘warga kelas dua’, sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih;
- 5) Minimnya data pemilih penyandang disabilitas berimplikasi minimnya sarana memilih bagi pemilih;
- 6) Sosialisasi pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas tidak massif dan dengan media yang tidak aksesibel;
- 7) Kerahasiaan pilihan harus terjamin walaupun pemilih harus didampingi di bilik suara.

Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya tentu menjadi tugas KPU Kabupaten

Sleman untuk selalu berusaha memberikan akses bagi penyandang disabilitas Melalui penyediaan fasilitas maupun prosedur yang berspektif disabilitas. melalui penyediaan fasilitas dan prosedur yang berspektif disabilitas, maka hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat diminimalisir karena mendapatkan aksesibilitas merupakan hak penyandang disabilitas untuk menunjang kemandiriannya. Pemberian aksesibilitas di sini untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam kehidupan bidang politik.